

Studi Determinan PDRB, IPM, UMK Atas TPT di Provinsi NTB Untuk Periode 2017-2023

Agista Cholli Daroini¹⁾ *, Siti Sriningsih²⁾

¹⁾ agistacholidaroini@gmail.com, ²⁾ sitisriningsih@unram.ac.id

¹²⁾ Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115, Indonesia

Jejak Artikel:

ABSTRAK

Upload: 23 September 2024
Revisi: 15 Oktober 2024
Diterima: 18 Oktober 2024
Tersedia online: 10 Februari 2025

Kata Kunci:

Fixed Effect Model;
Indeks Pembangunan Manusia;
PDRB;
Tingkat Pengangguran Terbuka;
Upah Minimum Kabupaten

Fokus riset ini untuk menentukan bagaimana pengaruh PDRB, IPM, dan UMK Dibandingkan dengan TPT di masing-masing kabupaten di wilayah NTB. banyaknya TPT adalah isu yang akan dijabarkan dalam studi ini. Studi ini menerapkan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dipakai merupakan data yang telah dikumpulkan dari tahun 2017 - 2023 terhadap 10 kota-kota di wilayah Nusa Tenggara Barat. Variabel independen studi ini adalah PDRB, IPM, dan Upah Minimum Kabupaten dan variabel yang terikatnya yaitu TPT. Analisis ini memakai regresi data panel berdasarkan laporan tahun 2017-2023 Fixed Effect Model (FEM) adalah model terpilih. Hasil studi menunjukkan aspek Produk Domestik Regional Bruto berdampak negatif dan tidak signifikan dalam kaitannya dengan tingkat pengangguran terbuka, variabel IPM berkontribusi secara negatif dan signifikan pada tingkat pengangguran terbuka, lalu pada variabel Upah Minimum Kabupaten berkontribusi positif tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi dan sosial berperan untuk mengatasi permasalahan pengangguran di NTB, dan juga menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Tingkat pengangguran merupakan sesuatu yang menjadi tugas terpenting pemerintah tentang menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkembang. Tingkat pengangguran dapat ditunjukkan dengan sejumlah standar, dalam analisis ini indikatornya adalah tingkat pengangguran terbuka karena metrik utama yang salah satu metode yang sering digunakan oleh pemerintah untuk mengukur keberhasilan kinerjanya di bidang ketenagakerjaan adalah dengan menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan disparitas dalam jumlah pekerja dan pengangguran. TPT sama dengan disparitas dalam jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persentase dan total pelamar pekerjaan. (Hakim & Agustiani, 2022).

* Corresponding author

Pengangguran bisa terjadi karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, kebijakan pemerintah yang kurang mendukung masyarakat, perkembangan Segmen ekonomi finansial, rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, serta tingginya tingkat pendidikan tanpa diikuti akses terhadap kesempatan kerja. Dalam budaya suatu wilayah di mana hanya perempuan yang bekerja sedangkan laki-laki tidak, dan di mana pelamar tidak memiliki akses yang cukup ke informasi pasar kerja. Pengangguran juga terkait dengan terputusnya perjanjian kerja, yang dapat dipicu oleh; instansi yang tutup atau memangkas operasinya sebagai imbas dari gejolak ekonomi atau situasi jaminan keselamatan yang tidak stabil; regulasi yang menghalangi investasi, pembatasan atau halangan pada transaksi internasional, faktor lainnya. (Ishak, 2018).

Di antara komponen elemen kunci dari pembangunan negara bangsa adalah pembangunan ekonomi dengan output utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Tambunan 2001). Ada empat kinerja (performance) makro pembangunan ekonomi Indonesia yang sering ditampilkan, yakni pertumbuhan, pemerataan, pendapatan per kapita, dan struktur ekonomi Indonesia (Hasibuan, 1993). Tingkat kemiskinan dipengaruhi secara signifikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang stabil & kuat dapat meningkatkan pendapatan individu, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, jika PDRB tidak merata dan tidak mencapai potensi penuhnya, maka kemiskinan tetap tinggi. Kesenjangan output, yaitu perbedaan antara PDRB aktual dan potensial, dapat memperburuk kemiskinan (Levine, 2012). Menurut Todaro (2003) Peningkatan ekonomi negara adalah proses yang kompleks dan mencakup berbagai dimensi, melibatkan peralihan mendasar pada sistem sosial, perilaku masyarakat, dan lembaga nasional, di samping upaya untuk meningkatkan PDRB, mengatasi disparitas wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan. Tujuan pembangunan ekonomi adalah agar menaikkan daya produksi dan melahirkan lebih banyak kesempatan kerja (Saptenno & Maatoke, 2022).

Menurut Musgrave (2003) Peran pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan PDRB dan meningkatkan taraf hidup penduduknya. Alokasi, distribusi, dan anggaran adalah tugas pemerintah. Dalam hal ini hubungannya dengan fungsi anggaran adalah sebagai bentuk barang publik layanan pemerintah (Suriadi et al., 2023). Pembangunan manusia sangat penting untuk memastikan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan mendapatkan cadangan sumber daya yang diperlukan agar bisa menempuh kehidupan yang superior, dan tetap sehat dan hidup lama. (Pratowo, 2012). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyediakan pandangan menyeluruh mengenai tingkat kemajuan manusia di suatu daerah, serta imbas kegiatan pembangunan yang dijalankan di sana. Peningkatan angka IPM memperlihatkan apakah kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah meningkat atau menurun. (Pusat et al., 2016).

Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, edukasi dan training yang buruk, dan distribusi lowongan pekerjaan yang tidak merata berperan penting dalam tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di beberapa negara. Untuk memitigasi masalah ini, penting bagi pemerintah untuk merumuskannya kebijakan yang mengutamakan penciptaan lapangan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta ketenagakerjaan fleksibilitas pasar. Hal ini penting bagi para pengambil kebijakan dan peneliti menyadari bahwa pengangguran merupakan masalah global yang memerlukan perhatian khusus perhatian segera (Triatmanto & Bawono, 2023).

Upah merupakan salah satu elemen yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Standar gaji minimum harus dibayar oleh pemberi kerja kepada karyawan mereka dikenal sebagai upah minimum. Pemerintah memutuskan upah minimum ini berlandaskan kebutuhan hidup minimum. (Henry 2011). Hal ini digarap oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya untuk

melindungi kepentingan umum, lebih khusus lagi kepentingan pekerja. Menurut Oktaviani & Lis Purnamadewi (2015) Hubungan antara gaji dan jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh suatu organisasi pada periode khusus disebut permintaan tenaga kerja. Tingkat upah akan turun, penyediaan pekerjaan akan bertambah banyak, dan tawaran sumber daya manusia ikut bertambah. Tingkat upah akan meningkat ketika tenaga kerja atau tingkat ketidakmampuan kerja yang tinggi. Upah yang berlangsung di suatu wilayah dapat berdampak baik atau buruk. Menurut Gilarsa (2002) Penawaran tenaga kerja dapat melihat dampak positif dari pemutusan upah, akibat peningkatan upah bakal menghasilkan lebih banyak pekerjaan dan lebih sedikit pengangguran. Namun, ada dampak negatif dari penetapan upah pekerja: ketika upah pekerja bertambah, berakibat ada penurunan pekerja karena perusahaan akan mengurangi pekerja, sehingga pengangguran meningkat (Helvira & Putria Rizki, 2020).

Tabel 1. (TPT) di kabupaten di Provinsi NTB periode 2017-2023 (%)

Wilayah	TPT wilayah NTB Sesuai Dengan Kabupaten Administratif (%)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Lobar	3.28	3.22	3.52	4.58	3.32	4.16	3.12
Kabupaten Lombok Tengah	2.9	2.98	2.35	3.74	2.33	3.02	2.78
Kabupaten Lombok Timur	3.64	3.02	3.35	4.17	2.79	1.51	2.47
Kabupaten Sumbawa	3.98	3.29	2.99	4.01	3.39	2.11	2.79
Kabupaten Dompu	2.36	3.18	3.04	3.28	3.02	2.50	2.36
Kabupaten Bima	1.55	4.63	2.79	2.89	1.58	2.28	2.15
Kabupaten Sumbar	5.15	3.53	5.29	5.50	5.52	4.56	3.54
Kabupaten Lombok Utara	1.74	-	1.99	3.01	1.75	0.38	1.40
Kota Mataram	5.35	6.49	5.28	6.83	5.19	6.03	4.78
Kota Bima	3.51	2.27	4.06	4.42	3.56	3.73	3.57

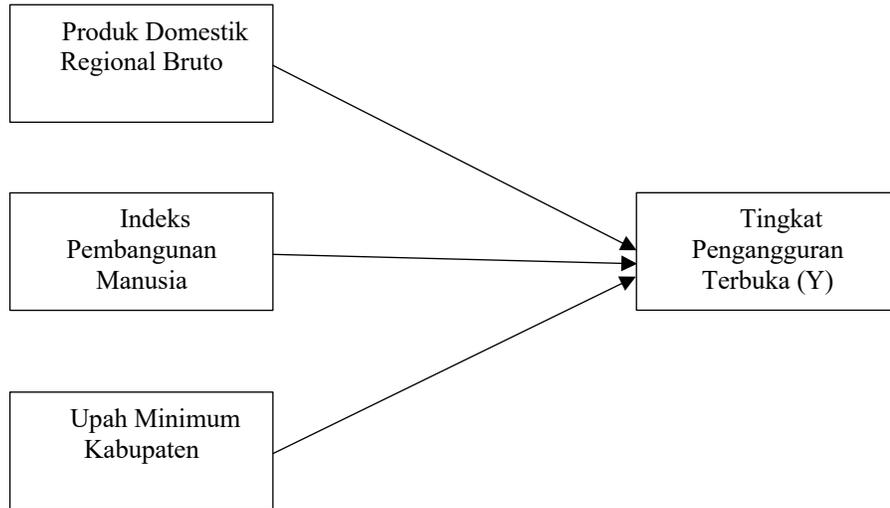
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2023

Format Tabel 1 menunjukkan TPT di Provinsi NTB yang dimaksudkan berbeda untuk setiap wilayah administratif. Angka pengangguran di daerah urban Mataram mencapai 5,35% pada tahun 2017. Kemudian meningkat menjadi 6,49% pada tahun 2018. Tantangan pengangguran yang teruk di suatu wilayah disebabkan oleh peningkatan usia angkatan kerja dan penurunan ketersediaan lapangan kerja.

Di wilayah Kabupaten Provinsi NTB, penurunan tingkat pengangguran menunjukkan bahwa perhatian tidak seharusnya fokus pada PDRB tetapi juga pada tingkat pengangguran yang disebabkan oleh pembangunan. Angka kemelaratn terkait dengan pengembangan sumber daya manusia; IPM dipergunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pada pengembangan sumber daya manusia. Menurut Statistik (2016), IPM terdiri dari tiga komponen utama: umur panjang dan kesehatan, tingkat pendidikan, serta standar hidup yang memadai.

Selama beberapa tahun terakhir, berbagai studi telah meneliti faktor-faktor yang berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sementara kesejahteraan masyarakat dapat dinilai melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, penelitian yang secara komprehensif menghubungkan kedua indikator tersebut dengan variabel baru, seperti Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), masih terbatas. Artikel ini mengangkat isu tersebut dengan tujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB dan IPM, serta memperkenalkan UMK sebagai variabel baru. Diharapkan variabel ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai keterkaitan antara kebijakan upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pengangguran

Menurut Tambunan Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan adalah faktor penting atau syarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi serta peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan peningkatan peluang kerja akan menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan tambahan, yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi di mana pertumbuhan ekonomi justru disertai dengan meningkatnya kemiskinan Zuliansyah et al., (2018).

Diambil dari skripsi SURYA (2011) Tingkat GDP akan mempengaruhi seberapa besar angka pengangguran yang terjadi. Setiap kali persentase pengangguran di suatu negara meningkat, hal ini akan diikuti oleh penurunan GDP sebesar 2 persen. Penurunan GDP diukur dengan menggunakan GDP berdasarkan harga konstan.

Peran Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang digunakan untuk menilai pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga aspek utama pembangunan manusia, yaitu: umur panjang, tingkat pendidikan, dan kualitas standar hidup. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada dalam rentang 0 hingga 100. IPM menilai pencapaian keseluruhan suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu harapan hidup, tingkat pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga dimensi tersebut diukur melalui angka harapan hidup, tingkat pencapaian pendidikan, dan pengeluaran per kapita. Jika IPM hanya dinilai berdasarkan pengeluaran per kapita, maka fokusnya hanya pada kemajuan status ekonomi suatu daerah atau negara berdasarkan pendapatan tahunan. Namun, jika dilihat dari sisi sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kualitas hidup masyarakat. IPM secara tidak langsung selalu berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Irfan Nurhab, 2022).

Indeks Pembangunan Manusia adalah proses untuk memperluas berbagai pilihan bagi masyarakat. Dalam konsep ini, penduduk dianggap sebagai tujuan utama, sementara pembangunan dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari penurunan tingkat pengangguran. Ketika seseorang memiliki pekerjaan dan penghasilan

tetap, hal ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang juga berarti memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Dengan demikian, perkembangan ini akan berdampak pada tingkat pembangunan manusia di suatu daerah. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa pengangguran dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, baik secara individu maupun secara kolektif (Desmiarti, 2019).

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten Terhadap Pengangguran

Penetapan upah minimum bertujuan untuk menjamin bahwa pekerja memiliki standar hidup dasar, termasuk kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan mereka. Terdapat dua jenis upah minimum: 1) Upah minimum yang ditetapkan secara lokal, yaitu gaji pokok dan tunjangan bagi karyawan dengan level terendah serta pengalaman kerja kurang dari satu tahun, yang dikenal sebagai upah minimum regional dan berlaku di beberapa wilayah. 2) Upah minimum sektoral, yaitu upah awal yang berlaku di suatu provinsi dan ditetapkan berdasarkan kemampuan masing-masing sektor industri (Lavenia et al., 2023).

Menurut teori efisiensi upah, perusahaan akan beroperasi lebih efisien jika upah berada pada tingkat ekuilibrium. Lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk mempertahankan upah yang tinggi meskipun terdapat kelebihan dalam penawaran tenaga kerja. Pengangguran terjadi karena upah berada di atas tingkat yang seimbang antara penawaran dan permintaan. Namun, terdapat satu perbedaan lainnya. Peraturan mengenai upah minimum dan serikat pekerja menghalangi perusahaan untuk menurunkan upah, meskipun terdapat kelebihan penawaran tenaga kerja. Teori upah efisien mengungkapkan bahwa dalam banyak situasi, batasan semacam itu tidak diperlukan karena perusahaan juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan upah di atas tingkat ekuilibrium. Menurut penelitian sebelumnya, yaitu Indriani (2019) hasil pengujian bahwa Upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian deskriptif berbasis kuantitatif. Penelitian ini memakai data panel, jenis data sekunder menggunakan kombinasi dari *Cross Section* sebanyak 10 kabupaten/kota dan data time series selama 6 tahun berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2023.

Tabel 2. Sampel Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Tahun
Kabupaten Lombok Barat	2017, 2018,
Kabupaten Lombok Tengah	2019, 2020,
Kabupaten Lombok Timur	2021,2022,
Kabupaten Sumbawa	2023
Kabupaten Dompu	
Kabupaten Bima	
Kabupaten Sumbar	
Kabupaten Lombok Utara	
Kota Mataram	
Kota Bima	

Sumber : data disusun sendiri, 2024

Tabel 3. Variabel & Skala Pengukuran

Variabel	Indikator	Skala
Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)	Tingkat Pengangguran Terbuka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu TPT pada periode 2017 - 2023 yang dihitung per tahun dalam satuan %.	Rasio (LOG)

Produk Domestik Regional Bruto (X1)	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan yang digunakan dalam penelitian pada periode 2017 - 2023.	Nominal (LOG)
Indeks Pembangunan Manusia (X2)	Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Rasio (LOG)
Upah Minimum Kabupaten (X3)	Kebutuhan Hidup Minimum, Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, Kondisi Pasar Tenaga Kerja, Kemampuan Perusahaan.	Nominal (LOG)

Sumber : data disusun sendiri, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut model regresi data panel riset ini dibuat:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X1_{it} + \beta X2_{it} + \beta X3_{it} + \varepsilon \quad (1)$$

Di mana: $Y = TPT$ (Tingkat Pengangguran Terbuka), $\alpha =$ Konstanta, $X1 = PDRB$, $X2 = IPM$, $X3 =$ Upah Minimum Kabupaten, $t =$ waktu, $i =$ Wilayah Provinsi NTB, dan $e =$ error term.

Model CEM, FEM, REM adalah sejumlah teknik yang diterapkan dalam regresi data panel untuk memperkirakan model regresi. Selanjutnya, untuk menetapkan model hasil yang paling kompatibel. Investigasi pendekatan memakai uji Chow atau Hausman untuk Model CEM adalah metode yang paling efektif untuk menguji model. Ini adalah metode yang mengasumsikan bahwa intercept untuk semua elemen dalam cross section adalah serupa. Atau bisa dikatakan, pendekatan tersebut menganggap jika tidak terdapat perubahan dalam konteks objek dari masa ke masa (Gujarati, 2012). Pada model *Fixed Effect*, dapat disimpulkan bahwa intercept bervariasi di antara objek, Koefisien (*slope*) dari variabel independen tetap tidak mengalami perubahan, baik di antara objek maupun seiring berjalannya waktu (Gujarati, 2012). Setiap individu dalam model *Fixed Effect* memiliki jumlah interceptnya sendiri.

Dalam REM data panel akan diperiksa untuk melihat apakah variabel gangguannya memiliki berhubungan secara berkala serta di antara elemen tersebut. Dalam beberapa situasi, FEM memiliki kelebihan karena lebih efektif dalam menangani perbedaan sistematis pada intercept antar subjek, serta menghasilkan estimasi yang lebih konsisten dan mudah dipahami. Namun, dalam situasi tertentu, REM bisa lebih unggul jika asumsi-asumsinya terpenuhi, karena estimasi yang dihasilkan cenderung lebih efisien. Analisis tersebut sering dijuluki sebagai teknik error component model (ECM) atau generalized least squares (GLS) (Saptenno & Maatoke, 2022). GLS memanfaatkan informasi mengenai variasi galat untuk menghasilkan estimasi yang lebih efisien dibandingkan OLS, terutama saat varians galat berbeda-beda antar observasi. Metode ini dibuat untuk mengatasi masalah varians galat yang tidak tetap (heteroskedastisitas). Metode GLS mampu menghasilkan estimasi parameter yang lebih tepat dan efisien, sehingga sering digunakan ketika data menunjukkan adanya heteroskedastisitas atau autokorelasi.

Uji Spesifikasi

Dalam menetapkan model yang akan diimplementasikan, ada 2 varian uji spesifikasi, yaitu FEM dan CEM. Tujuan dari analisis spesifikasi masing-masing adalah guna menentukan pendekatan analisis data panel yang akan diaplikasikan. Ketika menentukan efek mana yang akan diberlakukan, uji Chow memungkinkan untuk memilih salah satu dari model tetap atau model umum. Berikut teori dalam Uji Chow:

H0: Apabila probabil. *Cross-section* F melebihi nilai konstanta 0,05, akibatnya uji spesifikasi pada model CEM dapat dicapai.

H1 :Apabila probabil. *Cross-section* F lebih kecil dari konstanta 0,05, akibatnya uji spesifikasi pada model FEM dapat tercapai.

Uji Hausman didefinisikan sebagai pengujian untuk memutuskan model yang dipilih paling cocok, yaitu antara (FEM) dan (REM). Kali ini penulis akan membahas cara melakukan uji Hausman dalam regresi data panel menggunakan *Eviews 12*. Tujuan dari uji Hausman adalah untuk memilih model yang paling sesuai antara REM beserta FEM dalam pemodelan data panel. Probabilitas *cross-section* memberikan dasar untuk pelaksanaan uji Hausman (Widarjono, 2009).

- Jika probabilitas *cross section* F lebih kecil nilai konstanta 0,05, maka uji spesifikasi pada model FEM dapat dicapai
- Jika probabilitas *cross section* F melebihi nilai konstanta 0,05, maka uji spesifikasi pada model REM dapat dicapai.

Berikut adalah hasil perhitungan untuk uji Chow, Hausman, dan *Fixed Effect Model* (FEM):

Pengujian Regresi data panel

Uji Chow

Tabel 4. Output Pengolahan Uji Chow

Cross-section	Statistic	d.f.	probabilitas
Cross-section F	5.692819	(9,56)	0.0000
Cross-section F Chi-square	44.827535	9	0.0000

Sumber : data disusun sendiri, *Eviews 12*

Tahap awal untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai adalah melaksanakan uji Chow. Analisis ini digunakan agar mendapatkan model yang tepat antara CEM & FEM. Output dari analisis ini bisa terlihat di tabel 4. Tabel 4 menunjukkan nilai prob. dengan nilai 0.000 Yang merepresentasikan bahwa nilai tersebut Lebih rendah dari tingkat *alpha* 0.05, Sehingga, pilihan model yang diambil adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Tabel 5. Output Pengolahan Uji Hausman

Test summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	probabilitas
Cross-section random	15.568342	3	0.0014

Sumber : data disusun sendiri, *Eviews 12*

Uji Hausman dipakai mendefinisikan apakah sebaiknya menggunakan FEM atau REM. Hipotesis yang dipakai untuk analisis ini ialah sebagai berikut: jika probabilitas di bawah α (5%), maka H0 ditolak, yang berarti model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

dari hasil uji Hausman di Tabel 3, didapatkan nilai chi-square sebesar 15.568342. Dengan tingkat α sebesar 0,05, nilai X^2 tabel adalah 0.0014. Karena X^2 hitung > X^2 tabel, H0 ditolak. Dengan demikian, sebagai hasil, model terbaik yang dipilih melalui uji Hausman adalah *Fixed Effect Model*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk memastikan tidak ada korelasi tinggi atau sempurna antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang paling baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antara variabel-variabel independennya. Untuk Mengidentifikasi adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel independen. Keputusan mengenai multikolinearitas diambil berdasarkan pedoman berikut:

- Apabila nilai korelasi lebih dari 0,80, maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat masalah multikolinearitas.
- Apabila nilai korelasi kurang dari 0,80, maka H_0 diterima, yang berarti tidak ada masalah multikolinearitas.

Tabel 6. Output Pengolahan Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.385367	0.125104
X2	0.385367	1.000000	0.384947
X3	0.125104	0.384947	1.000000

Sumber : data disusun sendiri, *Eviews 12*

Hasil korelasi antara variabel independen (PDRB, IPM UMK) tidak dari 0,80. maka H_0 diterima. Dengan kata lain, tidak ditemukan kendala atau gejala multikolinearitas di dalam hubungan variabel independen dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7. Output Pengolahan Uji Heterokedastisitas

Variabel	Probabilitas
X1	0.4927
X2	0.4116
X3	0.4888

Sumber : data disusun sendiri, *Eviews 12*

Semua variabel mempunyai nilai probabilitas dalam penelitian ini di atas 5%, disimpulkan bahwa asumsi klasik dalam uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Tabel 8. Output Pengolahan Uji Autokorelasi

Durbin-Watson Stat	1.8037
--------------------	--------

Sumber : data disusun sendiri, *Eviews 12*

Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson yang terdapat pada hasil regresi *Fixed Effect Model* (FEM) sebesar $1,7015 < 1.8037 < 2,2985$. Apabila nilai Durbin Watson berada di antara -2 sampai +2 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji t

Tabel 9. Hasil Pengolahan Uji t

Variabel	T-Statistic	Probabilitas
PDRB	-0.143337	0.6581
IPM	-2.686010	0.0103
UMK	1.701234	0.1016

Sumber : data disusun sendiri, *Eviews 12*

Dari hasil uji t untuk variabel PDRB (X1), didapatkan nilai t hitung sebesar 0,143337, yang berada di bawah t tabel 1,99546, dan nilai signifikansi 0,6581 yang lebih tinggi dari 0,05. Ini mengakibatkan H_a ditolak dan H_0 diterima, yang mengindikasikan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT di NTB.

Dalam uji t untuk variabel IPM (X2), ditemukan nilai t hitung 2,686, yang lebih tinggi dibandingkan t tabel 1,995, serta nilai sig. 0,0103 yang lebih rendah dari 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel IPM memengaruhi TPT di NTB.

Dalam uji t untuk variabel UMK (X3), ditemukan nilai t hitung 1,701, yang lebih kecil dibandingkan t tabel 1,995, dan nilai sig. 0,1016 yang lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian, H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti variabel UMK tidak memiliki pengaruh terhadap TPT di NTB.

Tabel 10. Hasil Pengolahan dengan Metode FEM

Variabel	Koefisien	Probabilitas
PDRB	-0.011309	0.6581
IPM	-7.437191	0.0103
UMK	0.968497	0.1016
R-squared		0.649211
Adjusted R ²		0.574042
F-statistic		8.636678
Probabilitas(F-statistic)		0.000000

Sumber : data disusun sendiri, *Eviews 12*

Uji F

Berdasarkan tabel 10, F hitung tercatat sebesar 8.664738, yang lebih tinggi dibandingkan F tabel yang bernilai 2.743711, serta nilai sig. 0,000000 yang lebih rendah dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel PDRB, IPM, dan UMK berpengaruh terhadap TPT di Wilayah NTB.

Uji R²

Dari tabel 10, Hasil analisis uji R dalam penelitian ini mengindikasikan jika variabel-variabel independen PDRB, IPM, dan UMK, masing-masing bertanggung jawab secara bersamaan sebesar 57,40% dari variasi variabel dependen, yaitu variabel TPT. Dan 42,60% terakhir ditanggung oleh variabel alternatif. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pada konteks model penelitian ini, Variabel IPM adalah variabel yang memberikan dampak signifikan pada TPT, sementara Upah Minimum Kabupaten & PDRB bukan memiliki pengaruh signifikan. Semua variabel, termasuk PDRB, IPM, dan UMK, berpengaruh pada TPT di wilayah NTB. Hasil uji F yang terlihat pada tabel model efek tetap menunjukkan bahwa F hitung didapatkan nilai sebesar 8.636678 melebihi nilai F tabel hitung sebesar 2.743711, sementara jumlah signifikansi 0,000000 tidak lebih besar dari 0,05.

Model Regresi:

$$Y = 18.7270509842 - 0.0113085560953 * X1 - 7.43719128867 * X2 + 0.968496516306 * X3 \quad (2)$$

Berdasarkan perhitungan di atas, hasil pengujian secara parsial ditunjukkan sebagai berikut:

Dampak PDRB Pada TPT

Menurut hasil uji, hipotesis menunjukkan bahwa PDRB memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan. Nilai probabilitas 0,6581 dan koefisien -0.011309. Artinya, tingkat pengangguran akan meningkat sebesar 0,01% ketika PDRB meningkat 1% dan sebaliknya.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Nugraha (2023) dalam hal ini variabel PDRB menghantarkan dampak negatif yang kecil pada TPT di wilayah Jawa Barat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi di Jateng menghadapi peningkatan yang berdampak, Terdapat segudang sumber daya manusia kapabel yang belum terlibat karena adanya penanaman modal yang berfokus pada teknologi dan kurangnya pengembangan keterampilan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Pada TPT

Temuan pengujian hipotesis mengungkapkan jika IPM memberikan dampak negatif yang signifikan. Nilai probabilitas 0.0103 dan koefisien -7.437191 Artinya, Jika IPM naik sebesar 1%, tingkat pengangguran dapat turun hingga 7%, dan sebaliknya.

Ini sesuai dengan temuan studi Mahroji et al (2019) Dalam variabel (IPM) yang berkontribusi negatif dan berpengaruh signifikan terhadap TPT di daerah Banten. Studi ini mengindikasikan bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi sejalan dengan TPT yang lebih rendah.

Upah Minimum Kabupaten Pada TPT

Dari uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa pengaruh Upah Minimum Kabupaten positif, namun tidak menunjukkan signifikan. Poin ini terungkap dalam nilai probabilitas yang berjumlah 0.1016 dan koefisien 0.968497. Artinya, apabila UMK meningkat 1%, tingkat pengangguran akan meningkat 0,9 %.

Ini konsisten dengan temuan penelitian Soekapdjo & Oktavia (2021) yang menemukan bahwa UMK tidak memiliki efek signifikan terhadap TPT di Indonesia. Pemerintah menggunakan kebijakan UMK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, UMK akan menghalangi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan tetap bersaing. Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan kapasitas perusahaan ketika menentukan UMK.

KESIMPULAN

Melalui kajian dan penelaahan sebelumnya, hasilnya menunjukkan bahwa PDRB memiliki dampak negatif yang tidak signifikan terhadap TPT; Penemuan ini mengungkapkan jika pertumbuhan PDRB sebanding dengan penurunan TPT di setiap kabupaten di wilayah NTB. Temuan menunjukkan jika IPM memberikan dampak negatif terhadap TPT; semakin tinggi IPM, TPT juga akan menurun di setiap kabupaten di Wilayah Nusa Tenggara Barat. kemudian, UMK tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap TPT di wilayah NTB. Analisis memperlihatkan yang menunjukkan kenaikan pendapatan pekerja akan menyebabkan peningkatan TPT di setiap kabupaten di Wilayah Nusa Tenggara Barat. Akibatnya, jumlah pekerja akan berkurang dan pengangguran akan meningkat.

REKOMENDASI

Pemerintah di wilayah NTB sebaiknya memperkuat pemerataan antarwilayah dan mengoptimalkan peluang setiap kota di Provinsi NTB berdasarkan karakteristik dan kondisi geografisnya, sehingga dapat menekan angka pengangguran. Pemerintah perlu meningkatkan Integritas, Kejujuran, dan Kecakapan dalam penggunaan anggaran operasional, serta merangsang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB dengan meneguhkan sektor-sektor ekonomi yang mampu berkembang.

Kemudian, kebijakan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia akan membantu menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan elemen IPM seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran harus berkonsentrasi pada menciptakan lapangan kerja, memberikan pelatihan keterampilan, dan mendukung sektor ekonomi yang memiliki peluang besar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

REFERENSI

- Aulia, N. R., Syafitri, A., Pratama, A. A., Azizah, W., Fitria, A. O., & Kholiq, F. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2022. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3601>
- Florian Kuswanto, T., Dwi Bayu Bawono Program Studi Akuntansi, A., & Ekomomi dan Bisnis, F. (n.d.). Pengaruh Realisasi Belanja Kesehatan Belanja Pendidikan Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Sebagai Variabel Moderas. www.djpk.kemenkeu.go.id
- Gessan Septiyanto, W., & Tusianti, E. (2020). Analisis Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9, 119–131. <https://doi.org/10.52813/jei.v9i2.40>
- Gilarso, T. (2002). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Kasanius.
- Gujarati, D. N. (2012). Dasar-dasar Ekonometrika (Terjemahan). (Edisi 5). Salemba.
- Hakim, L., & Agustiani, E. (2022). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi NTB Pada Tahun 2010-2021. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v10i1.158>
- Hasibuan, N. (1993). Pemerataan Dan Pembangunan Ekonomi: Teori dan Kebijakan. Universitas Sriwijaya.
- Helvira, R., & Putria Rizki, E. (2020). Pengaruh Investasi, Upah Minimum Dan Ipm Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Kalimantan Barat. 1(1), 53–62. <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jiseb>
- Henry, F. N. (2011). Ekonomi Manajerial: Edisi Revisi. PT. RajaGrafindo Persada.
- Ishak, K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinya terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia. <https://www.neliti.com/publications/314795/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengangguran-dan-inflikasi-terhadap-indeks-pemba>
- Levine, L. (2012). CRS Report for Congress Economic Growth and the Unemployment Rate. www.crs.gov
- Mahroji, D., Ekonomi, J., Stie, P., & Madania, P. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. 9(1). <http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436>
- Musgrave, R. A. & M. Peggy. B. (2003). State finance in theory and practice. Erlangga.
- Nugraha, R. N. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021. Bandung Conference Series: Economics Studies, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bceses.v3i1.7060>
- Oktaviani, R., & Lis Purnamadewi, Y. (2015). Pengaruh Foreign Direct Investment Dan Afta Terhadap Kesempatan Kerja Sektoral Di Asean 5 (Vol. 4, Issue 2). <https://doi.org/10.29244/jekp.4.2.2015.140-152>
- Pratowo, N. I. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i1.19815>
- Pusat, B., Kabupaten, S., & Timur, T. J. (2016). Indeks Pembangunan Manusia.
- Saptenno, F., & Maatoke, C. K. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Maluku. *Jurnal Cita Ekonomika*, 16(1), 41–49. <https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v16i1.5760>

- Soekapdjo, S., & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 94–102. <https://doi.org/10.31294/eco.v5i2.10070>
- Statistik, B. P. (2016). Indeks Pembangunan Manusia.
- Suriadi, I., Sriningsih, S., & Fatimah, S. (2023). Government Expenditure according to Functions and Economic Growth in Indonesia. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(5), 1933–1956. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i5.3957>
- TAMBUNAN, T. (2001). *Perekonomi Indonesia: Teori Dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. S. C. S. (2003). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I (edisi 8)*. Erlangga.
- Triatmanto, B., & Bawono, S. (2023). The interplay of corruption, human capital, and unemployment in Indonesia: Implications for economic development. *Journal of Economic Criminology*, 2, 100031. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100031>
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga*